



**Pemerintah
Kota Surakarta**



EXECUTIVE SUMMARY

PENYUSUNAN KAJIAN MASTERPLAN INVESTASI KOTA SURAKARTA

2023

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Surakarta**



Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta



balitbangdaska@surakarta.go.id

EXECUTIVE SUMMARY

PENYUSUNAN KAJIAN MASTERPLAN INVESTASI KOTA SURAKARTA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Surakarta, sebagai salah satu wilayah dengan keterbatasan dari sisi sumber daya alam, namun memiliki keunggulan dari sisi letak geografis dan pertumbuhan penduduknya. Seperti kita ketahui, letak geografis Kota Surakarta yang berada di tengah, serta menjadi simpul pertemuan jaringan transportasi darat, mendukung peran Kota Surakarta sebagai pusat dari wilayah pengembangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebaran PDRB kabupaten/kota di SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2021, Kota Surakarta memberikan kontribusi paling besar dibanding dengan 6 kabupaten lainnya yaitu sekitar 18,91% dari total PDRB SUBOSUKAWONOSRATEN. Di satu sisi, Kota Surakarta sendiri memiliki kendala terkait dengan ketersediaan lahan yang semakin sempit. Merujuk pada peta tata guna tanah RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041, sisa lahan yang belum terbangun di Kota Surakarta sebesar 10,3% dari luas wilayah kota sebesar 4.672,31 Ha (sebesar 481,25 Ha).

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%, dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 6,25%. Kondisi ini selaras dengan nasional yang mengalami tren positif ditahun 2022. Sementara itu, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 55.964,80 milyar rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 41.066.139,47 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi penanaman modal asing, jika dikelola dengan baik maka akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna

Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, besaran investasi di Kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 535.613,35 juta rupiah, yang terdiri dari PMDN sebesar 450.421,70 juta rupiah dan PMA sebesar 85.191,65 juta rupiah. Nilai investasi ditahun 2022 tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 154.887,60 juta rupiah. Kenaikan investasi ditahun 2022 sangat signifikan, di mana PMA mengalami kenaikan sebesar 98,06%, sedangkan pada PMDN naik sebesar 65,98%. Artinya terdapat perbaikan kinerja investasi di Kota Surakarta paska pandemi Covid 19.

Penanaman modal di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penanaman Modal. Penetapan kebijakan penanaman modal tersebut dalam rangka untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, menciptakan kemudahan kepastian berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota Surakarta. Selain

itu, diharapkan dalam penyelenggaraan penanaman modal mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Rencana Umum penanaman modal di Kota Surakarta telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Surakarta. Pada perubahan Peraturan Walikota tersebut, fokus pada kebijakan pembangunan Kota Surakarta tahun 2021-2025 dengan target investasi pada investasi umum, bidang pangan, infrastruktur, energi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan promosi penanaman modal.

Dengan berbagai kondisi tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan langkah-langkah strategis bidang penanaman modal yang bersifat jangka panjang. Hal tersebut penting dilakukan untuk menuju pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang tinggi, dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam menarik investor. Untuk itu, pada tahun 2023 ini Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan rancangan kebutuhan investasi untuk dua puluh tahun ke depan dalam bentuk Masterplan Investasi, yang memberikan gambaran mengenai profil investasi, peluang dan potensi investasi, jenis investasi yang memiliki potensi ditawarkan, rancangan kebutuhan investasi pada sektor-sektor potensial dan target pelaksanaan investasi yang dijabarkan dalam kurun waktu lima tahunan sampai dengan tahun 2045.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan Perencana Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta adalah sebagai dasar penentuan kebijakan dan program pengembangan investasi serta pembangunan yang lebih rinci dan komprehensif. Adapun tujuan dari penyusunan kajian adalah:

1. Menyusun profil investasi di Kota Surakarta
2. Mengkaji potensi investasi Surakarta meliputi jenis dan skala/ besaran.
3. Menyusun Masterplan investasi jangka panjang 2025-2045
4. Membantu Pemerintah Kota dalam promosi peluang investasi kepada calon investor.
5. Menyediakan pokok-pokok materi promosi investasi berdasarkan pada hasil kajian ini.

Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Perencana Penyusunan Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta adalah:

1. Tersusunnya informasi potensi dan peluang investasi
2. Tersusunnya daftar investasi yang dapat dikembangkan di Surakarta
3. Tersusunnya informasi peluang investasi di Kota Surakarta sebagai dampak dari kondisi regional-nasional dan intra wilayah
4. Tersusunnya peta potensi investasi untuk kepentingan promosi
5. Tersusunnya Roadmap Investasi Jangka Menengah yang menjadi bagian dari dokumen masterplan investasi.

PROFIL INVESTASI KOTA SURAKARTA

Perkembangan Investasi

Perkembangan penanaman modal di Kota Surakarta berdasarkan status modal, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.

Sementara PMDN merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN bisa berupa usaha perorangan maupun badan usaha, seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan, yang melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia. Data terkait dengan PMA dan PMDN periode 2017-2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Table 1: Investasi Berdasarkan Realisasi Kota Surakarta Tahun 2017-2022

No	Klasifikasi	Tahun					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
A.	PMA						
1.	Proyek	18	32	45	90	96	91
2.	Investasi (Juta Rp)	3.329	89	632,9	2.282,3	1.651,2	85.191,65
3.	TKI	174	48	24	379	35	38
4.	TKA	0	0	0	0	0	0
B.	PMDN						
1.	Proyek	22	32	153	364	1.367	1.128
2.	Investasi (Juta Rp)	29.262	383.299	212.675	391.913	153.236,40	450.421,70
3.	TKI	30	155	1.281	1.476	2.487	931
4.	TKA	2	0	0	3	0	9

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.

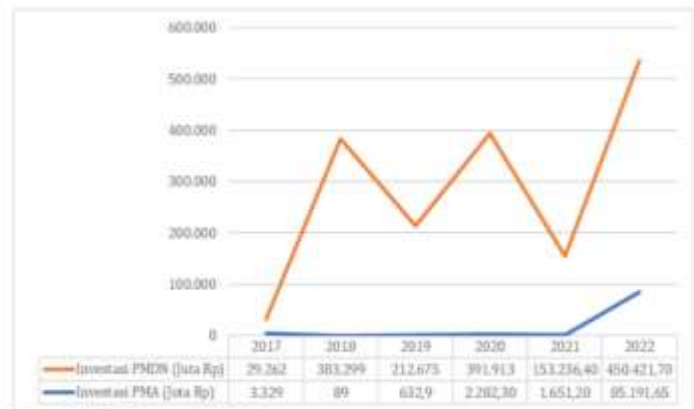
Perkembangan investasi di Kota Surakarta cenderung fluktuatif pada periode 2017-2022, baik untuk PMA maupun PMDN. Kondisi ini bisa jadi dipengaruhi kondisi dalam negeri maupun luar negeri seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Dimana faktor dari dalam negeri yang menyebabkan naik-turunnya investasi adalah karena pada tahun-tahun tersebut merupakan tahun politik. Sementara faktor luar negeri yang membuat investasi menjadi fluktuasi adalah karena diberlakukannya kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat dan gejolak harga komoditas yang membuat para investor menjadi cenderung menunggu.

Investasi yang masuk di Kota Surakarta pada tahun 2017-2022, sebagaimana daerah lain di Indonesia, memang cenderung masih didominasi oleh PMDN (84,09%). Sementara proporsi PMA relatif sangat tidak signifikan terhadap total penanaman modal (15,91%). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta relatif belum menjadi tujuan investasi bagi investor asing.

Peluang investasi di Kota Surakarta yang relatif terbatas menjadi salah satu kemungkinan yang menyebabkan minimnya jumlah PMA yang masuk di daerah tersebut, misalnya di bidang industri pengolahan. Kondisi ini tentu bukan tanpa alasan karena, sebagai wilayah perkotaan, Kota Surakarta tentu cukup kesulitan untuk menyediakan lahan yang cukup luas bagi industri pengolahan untuk membangun pabrik dan fasilitas pendukungnya. Oleh sebab itu mudah dimengerti jika sektor industri pengolahan relatif tidak cukup berkembang seperti sektor ekonomi lainnya.

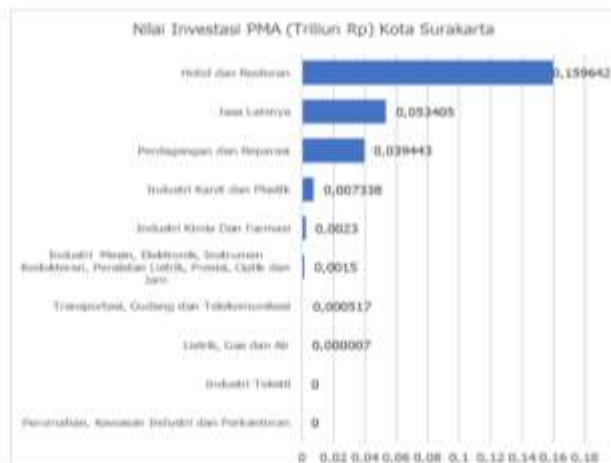
Nilai investasi yang masuk di Kota Surakarta, baik PMA maupun PMDN, harus diakui relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan total investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 0,74%. Hal ini sebenarnya mudah dipahami mengingat luas wilayah Kota Surakarta juga relatif sangat terbatas dibandingkan dengan total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, jika proporsi investasi Kota Surakarta tersebut diuraikan, berasal dari kontribusi PMA sebesar 0,28% dan PMDN sebesar 0,79%.

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai investasi PMDN yang masuk di Kota Surakarta pada tahun 2017-2022 memang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PMA. Namun demikian, dibalik



Sumber: DPMPTSP Prov Jateng 2023. Diolah

Gambar 1: Perkembangan Investasi Menurut Status Modal Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)



Gambar 2: Sub Sektor Industri PMA di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

yang menjadi primadona penanaman modal di Kota Surakarta adalah hotel dan restoran. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika jumlah hotel bintang dan non bintang di daerah ini relatif cukup banyak.

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Surakarta ada 166 hotel di daerah ini, yang terbagi atas 4 hotel bintang lima, 7 hotel bintang empat, 17 hotel bintang tiga, 17 hotel bintang dua, 8 hotel bintang satu, 100 hotel nonbintang, 7 home stay, dan 6 akomodasi lainnya. Karenanya, dengan luas 44 Km², rata-rata tiap satu kilometer ada 3-4 hotel di Kota Surakarta.

Data lain dari BPS Kota Surakarta menyatakan bahwa hotel bintang empat mempunyai tingkat pertumbuhan paling tinggi dibandingkan kelas hotel lainnya, baik bintang maupun non bintang.

Pertumbuhan hotel di atas ternyata diikuti oleh restoran dan rumah makan di Kota Surakarta. Hal ini bisa dilihat dari data tingkat pertumbuhan restoran dan rumah makan di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir sebelum pandemi covid-19, yaitu sebesar 6.57%. Namun demikian tidak penjelasan lebih lanjut apakah pertumbuhan tersebut dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk makan di restoran dan rumah makan atau makin tingginya tingkat kunjungan wisatawan di Kota Surakarta.

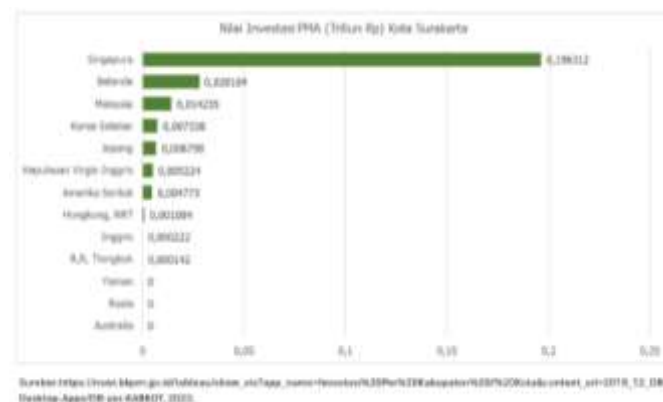
Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagian besar PMA yang masuk di Kota Surakarta berupa usaha hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan sektor usaha hotel dan restoran relatif potensial di Kota Surakarta dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika cukup banyak hotel jaringan internasional yang beroperasi di daerah ini, seperti Swiss-Belhotel International, Aston International, dan sebagainya.

Tingginya minat PMA untuk menanamkan modalnya pada bisnis hotel dan restoran di Kota Surakarta ternyata diikuti oleh PMDN. Hal ini bisa dilihat dari data BKPM yang menunjukkan tingginya nilai PMDN investasi pada usaha hotel dan restoran dibandingkan sektor usaha lainnya. Bahkan, secara kuantitatif, nilai investasi dibidang perhotelan dan restoran tersebut jauh lebih besar daripada akumulasi nilai investasi untuk seluruh sektor lainnya tersebut. Oleh sebab itu memang tidak bisa diingkari jika bisnis hotel dan restoran dianggap prospektif oleh para investor yang menanamkan dananya di Kota Surakarta.



Gambar 3: Sub Sektor Industri PMDN di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

Tingginya nilai investasi sektor perhotelan dan restoran di Kota Surakarta sejalan dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi daerah ini, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman).



Gambar 4: Negara Asal PMA di Kota Surakarta (Triliun Rupiah)

Data yang yang dilansir oleh Pemerintah Kota Surakarta menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Surakarta cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017-2019. Apalagi memang cukup banyak event atau kegiatan lokal, regional, nasional, dan internasional yang diselenggarakan di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir.

Kunjungan wisatawan di Kota Surakarta memang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sejalan dengan terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia. Namun demikian jumlah wisatawan di Kota Surakarta, khususnya wisnus, kembali meningkat pada tahun 2021 padahal

pandemi covid-19 tengah mencapai puncak. Hal ini seakan menunjukkan bahwa masyarakat tetap membutuhkan hiburan dan berwisata dalam kondisi seperti apapun.

Grafik di atas menyajikan asal negara PMA yang masuk di Kota Surakarta. Berdasarkan data tersebut tampak bahwa investasi yang berasal dari Singapura merupakan PMA yang cukup dominan di Kota Surakarta. Negara lain yang cukup memberikan kontribusi terhadap penanaman modal di Kota Surakarta adalah Belanda, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Kepulauan Virgin Inggris, dan Amerika Serikat. Diluar beberapa negara ini sebenarnya masih ada PMA dari negara lain yang masuk di Kota Surakarta meski nilai investasinya relatif kecil.

Potensi Investasi

Kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta ini disusun sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang berisi kajian eksisting wilayah, perkembangan investasi, kebutuhan investasi, kebutuhan infrastruktur penunjang investasi, dan sebagainya. Itu sebabnya mengapa *masterplan* investasi sering disebut sebagai wadah hukum untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan investasi.

Oleh sebab itu, untuk memperoleh hasil yang komprehensif, kajian ini akan mengidentifikasi sektor ekonomi yang selama ini menjadi sektor unggulan di Kota Surakarta. Dalam kajian ini identifikasi terhadap sektor investasi unggulan akan dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan berbasis Pendapatan Daerah Regional Daerah (PDRB), yaitu analisis *location quotient* (LQ) dan analisis *shift share*.

Analisis *location quotient* pada dasarnya merupakan metode yang digunakan untuk potensi sebuah daerah, termasuk dibidang investasi. Dimana analisis ini dilakukan dengan menentukan satu atau beberapa sektor ekonomi di daerah tersebut menjadi sektor basis atau (*leading sector*). Secara konseptual sektor basis akan ditentukan dengan membandingkan peran suatu sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau perbandingan terhadap suatu daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar.

Sementara analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan satu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas.

Oleh sebab itu memang ada perbedaan antara hasil yang diperoleh dari analisis LQ dan analisis *shift share*, dimana output analisis LQ digunakan sebagai dasar untuk menentukan dan menetapkan sektor unggulan (basis) dari suatu wilayah tertentu. Sementara output dari analisis *shift share* akan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja atau produktifitas kerja perekonomian sebuah daerah, yaitu dengan cara membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (tingkat regional atau nasional).

Kedua metode analisis ini memang bisa digunakan secara bersama-sama karena ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Apabila di suatu daerah ada sektor yang menjadi basis maka analisis analisis *shift share* akan digunakan untuk membandingkan keunggulan komparatif sektor tersebut dengan sektor yang sama dari daerah yang cakupan skalanya lebih besar, seperti perbandingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Namun jika sebuah produk tertentu

sudah menjadi unggulan di tingkat provinsi maka bisa dipastikan bahwa produk tersebut menjadi sektor basis, serta unggulan di daerahnya.

Selanjutnya, mengingat kedua pendekatan di atas menggunakan data-data PDRD sebagai dasar analisis maka akan disajikan PDRB Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Table 2: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)

No	Jenis Usaha	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136,489.99	141,975.97	146,185.36	149,001.94	152,191.74	155,546.81
2.	Pertambangan dan Penggalian	530.74	200.92	185.49	174.08	148.36	116.56
3.	Industri Pengolahan	2,450,405.47	2,556,984.70	2,707,251.45	2,598,563.54	2,757,755.01	2,915,401.41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	72,109.52	75,706.00	79,648.25	80,914.24	86,460.08	91,174.06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	53,818.10	56,315.73	58,986.31	60,886.07	58,270.83	56,546.88
6.	Konstruksi	8,273,638.75	8,688,085.26	9,088,768.34	8,909,743.46	8,971,026.38	9,067,626.56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	7,432,993.59	7,800,993.15	8,205,089.06	7,779,824.28	8,227,240.68	8,605,954.38
8.	Transportasi dan Pergudangan	908,893.25	960,615.10	1,030,897.73	386,201.81	399,568.57	924,542.36
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,605,808.59	1,672,613.64	1,759,781.79	1,474,706.35	1,599,051.16	2,296,552.48
10.	Informasi dan Komunikasi	4,368,733.75	4,897,768.51	5,393,512.88	6,455,883.90	6,951,672.31	7,098,628.47
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,094,706.81	1,131,379.74	1,181,579.42	1,206,749.40	1,234,323.51	1,261,340.69
12.	Real Estate	1,398,274.02	1,433,835.71	1,476,560.66	1,482,893.04	1,533,565.90	1,622,052.68
13.	Jasa Perusahaan	234,951.42	256,239.26	280,665.53	256,718.39	262,333.82	280,145.88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	1,682,112.54	1,732,862.82	1,800,423.00	1,761,678.74	1,758,276.59	1,796,912.24
15.	Jasa Pendidikan	1,333,726.85	1,411,139.38	1,495,586.53	1,481,236.98	1,483,178.66	1,532,096.13
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	328,182.40	357,001.84	379,101.04	425,010.18	430,202.70	446,538.85
17.	Jasa Lainnya	310,104.68	332,182.93	356,884.83	305,778.92	305,981.96	324,811.93
	PDRB	31,685,480.46	33,505,900.66	35,441,107.67	34,815,965.32	36,211,248.26	38,475,988.36

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023.

1. Analisis Location Quotient

Analisis LQ pada dasarnya merupakan pendekatan yang menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor di daerah yang diamati dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas/regional/nasional. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk koefisien LQ dapat menggunakan satuan jumlah tenaga kerja hasil produksi, nilai tambah, atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Kemudian menentukan sektor basis dan non basis adalah dengan melihat sektor yang dominan dalam perekonomian sebagai sektor basis, misalnya industri pengolahan atau konstruksi, dan sisanya sebagai sektor non basis. Namun untuk cara yang terakhir ini diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai perekonomian di daerah tersebut.

Secara konsepsional, tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah disebabkan karena adanya kegiatan produksi masyarakat di wilayah/daerah yang bersangkutan yang dapat dijual (diekspor) ke wilayah/daerah lainnya. Konsep ini dapat dijelaskan melalui konsep basis ekonomi (*economic base*). Pada dasarnya kegiatan dalam suatu daerah dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan yang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh bersangkutan bahkan harus mengimpor dari daerah lain. Dengan demikian pertumbuhan sektor-sektor (basis dan non basis) ini sangat dipengaruhi oleh pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya dengan menggunakan data PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2022 yang sudah disajikan dalam bagian sebelumnya akan dihitung nilai LQ untuk setiap sektor ekonomi di Kota Surakarta. Hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Table 3: Indeks LQ Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Industri Pengolahan	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.07	2.05	2.03	2.03	2.05	2.05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.40	2.40	2.40	2.15	2.05	2.30
6.	Konstruksi	2.48	2.46	2.49	2.32	2.28	2.42
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	1.60	1.59	1.55	1.54	1.53	1.57
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.84	0.83	0.45	0.45	0.60	0.67
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.53	1.47	1.33	1.35	1.64	1.49
10.	Informasi dan Komunikasi	3.02	2.97	3.05	3.07	3.04	3.03
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.24	1.25	1.23	1.23	1.24	1.24
12.	Real Estate	2.26	2.20	2.19	2.21	2.20	2.23
13.	Jasa Perusahaan	1.99	1.97	1.92	1.89	1.89	1.95
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	2.02	2.01	1.98	1.97	1.97	2.00
15.	Jasa Pendidikan	1.09	1.07	1.05	1.05	1.06	1.07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.22	1.21	1.25	1.25	1.26	1.24
17.	Jasa Lainnya	0.59	0.57	0.53	0.52	0.49	0.55

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan indeks LQ Kota Surakarta tahun 2017-2022 untuk seluruh sektor ekonomi di daerah tersebut. Hasilnya menunjukkan ada beberapa

sektor ekonomi yang menjadi sektor basis karena nilai indeks LQ lebih besar daripada satu. Selain itu hasil analisis juga menunjukkan ada beberapa sektor ekonomi lain yang menjadi sektor non basis karena nilai indeks LQ bernilai kurang dari satu.

- a. Sektor basis Kota Surakarta :
- Pengadaan listrik dan gas.
 - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.
 - Konstruksi.
 - Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil.
 - Penyediaan akomodasi dan makan minum.
 - Informasi dan komunikasi.
 - Jasa keuangan dan asuransi.
 - Real estate.
 - Jasa perusahaan.
 - Administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial.
 - Jasa pendidikan.
 - Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- b. Sektor non basis Kota Surakarta :
- Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - Pertambangan dan penggalian.
 - Industri pengolahan.
 - Transportasi dan pergudangan.
 - Jasa lainnya.

Dari analisis LQ yang telah dilakukan di atas, ada beberapa sektor ekonomi yang menjadi sektor non basis, misalnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tentu bukan tanpa alasan mengapa beberapa sektor tersebut menjadi sektor tersebut, salah satunya adalah karena Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan yang sebagian besar kawasannya diperuntukkan untuk permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Hingga hampir tidak ada lahan yang bisa digunakan sebagai kawasan pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian.

Kota Surakarta juga relatif tidak begitu menonjol sebagai kawasan industri pengolahan karena industri semacam ini biasanya memerlukan lahan yang relatif luas untuk membangun pabrik dan fasilitas pendukungnya. Padahal wilayah Kota Surakarta sudah relatif dipenuhi dengan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Oleh sebab itu mudah dipahami jika sebagian besar pelaku industri memilih kawasan-kawasan di sekitar Kota Surakarta untuk mendirikan pabriknya, seperti Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo.

Industri transportasi dan pergudangan juga tidak menjadi sektor basis di Kota Surakarta karena sebagai daerah dengan wilayah yang relatif terbatas, *demand* terhadap layanan transportasi untuk kebutuhan pribadi maupun usaha menjadi terbatas. Masyarakat cukup mudah memenuhi kebutuhannya dengan kendaraan pribadinya. Demikian

pula dengan para pengusaha yang cukup mampu memenuhi kebutuhan transportasi dengan armada angkutan yang dimiliki secara pribadi.

Hal yang sama juga terjadi untuk layanan pergudangan di Kota Surakarta. Sejalan dengan terbatasnya industri pengolahan di daerah ini membuat demand gudang untuk menyimpan barang menjadi relatif terbatas. Apalagi para pelaku industri perdagangan biasanya juga telah mempunyai gudang sendiri untuk menyimpan barang-barang dagangannya.

2. Analisis Shift Share

Analisis *shift share* digunakan untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Analisis ini membandingkan laju pertumbuhan suatu sektor di wilayah yang sempit terhadap wilayah yang lebih luas. Secara konseptual, ada tiga komponen *shift share* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis tersebut, yaitu:

- National/Regional Share.** *National share* digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- Proportional Shift.** *Proportional shift* digunakan untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.
 - Proportional shift* < 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki pertumbuhan yang lambat.
 - Proportional shift* > 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki pertumbuhan yang cepat.
- Differential Shift.** *Differential shift* digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan.
 - Differential shift* < 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki daya saing yang rendah.
 - Differential shift* > 0 : Sektor i pada wilayah tinjauan memiliki daya saing yang tinggi.

Table 4: Analisis Shift Share Kota Surakarta Tahun 2010-2022 (Juta Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Regional Share	Proportional Shift	Defferential Shift	Total Kinerja
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	73,756.26	(40,001.60)	14,166.35	47,921.00
2.	Pertambangan dan Penggalan	410.52	(69.57)	(823.43)	(482.48)
3.	Industri Pengolahan	1,121,188.06	(124,964.99)	283,130.37	1,279,353.44
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	32,251.56	10,528.32	1,332.41	44,112.29
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	33,102.27	(14,503.16)	(10,355.37)	8,243.74
6.	Konstruksi	4,153,066.19	7,989.56	(1,153,621.70)	3,007,434.05
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	3,504,196.99	(46,620.03)	35,020.83	3,492,597.79
8.	Transportasi dan Pergudangan	388,005.58	324,538.79	(354,183.33)	358,361.04

No	Sektor Ekonomi	Regional Share	Proportional Shift	Defferential Shift	Total Kinerja
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	716,092.87	361,535.69	173,994.60	1,251,623.16
10.	Informasi dan Komunikasi	1,671,685.28	3,366,949.31	(379,344.70)	4,659,289.89
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	536,621.15	(61,532.87)	3,209.86	478,298.15
12.	Real Estate	621,910.55	180,704.46	(88,059.95)	714,555.06
13.	Jasa Perusahaan	93,456.98	80,060.80	(29,745.20)	143,772.59
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	950,887.85	(589,335.01)	47,815.06	409,367.91
15.	Jasa Pendidikan	538,488.73	578,119.94	(370,280.27)	746,328.40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,566.70	125,540.40	12,203.66	263,310.76
17.	Jasa Lainnya	152,453.56	36,049.68	(86,152.95)	102,350.29
	PDRB	14,713,141.12	4,194,989.73	(1,901,693.77)	17,006,437.08

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan hasil perhitungan *regional share*, *proportional share*, *defferential share*, dan total kinerja Kota Surakarta yang dihitung dengan metode *shift share*. Dimana atas hasil perhitungan analisis *shift share* tersebut dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Regional Share : Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (*regional growth effect/regional share*) terhadap perekonomian Kota Surakarta menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output sebesar Rp 14,713,141.12 (Juta). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Surakarta tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah.
Sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kota Surakarta dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah adalah sektor konstruksi dengan angka komponen paling tinggi (*regional share*) dari seluruh sektor (Rp 4,153,066.19 Juta). Kemudian sektor yang memiliki pertumbuhan paling lambat di Kota Surakarta dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar Rp 410.52 Juta.
- b. Proportional Share : Pergeseran proposional (*proportional shift*) secara keseluruhan atau total perekonomian Kota Surakarta tergolong sudah maju. Hal ini dapat dilihat dengan nilai *proportional shift* yang positif sebesar Rp 4,194,989.73 Juta. Ada sebelas sektor yang sudah tergolong maju atau cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah karena nilai *proposional shif* yang positif, yaitu sektor (a) pengadaan listrik dan gas, (b) konstruksi, (c) transportasi dan pergudangan, (d) penyediaan akomodasi dan makan minum, (e) informasi dan komunikasi, (f) real estate, (g) jasa perusahaan, (h) jasa pendidikan, (i) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta (j) jasa lainnya. Sedangkan ketujuh sektor lainnya dikategorikan mempunyai pertumbuhan yang lambat kemajuan dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah, yaitu sektor

- (a) pertanian, kehutanan, dan perikanan, (b) pertambangan dan penggalan, (c) industri pengolahan, (d) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (e) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil, (f) jasa keuangan dan asuransi, serta (g) administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial.
- c. Defferential Share : Pergeseran diferensial (*differential shift*) secara keseluruhan atau total maka perekonomian Kota Surakarta tidak memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional yang tinggi atau kuat terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat pada nilai *differential shift* yang negatif, yaitu -Rp 1,901,693.77 Juta. Analisis secara sektoral menunjukkan ada cukup banyak sektor ekonomi di Kota Surakarta memiliki nilai *differential shift* negatif, yaitu sektor (a) pertambangan dan penggalan, (b) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, (c) konstruksi, (d) transportasi dan pergudangan, (e) informasi dan komunikasi, (f) real estate, (g) jasa perusahaan, (h) jasa pendidikan, serta (i) jasa lainnya.
- Hal itu dapat diartikan bahwa sektor-sektor ekonomi di atas tidak memiliki daya saing yang kuat atau memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah.
- d. Total Kinerja : Perekonomian Kota Surakarta mendapatkan hasil yang sangat positif terhadap nilai total kinerja selama kurun waktu 2010-2021 karena mengalami kenaikan nilai absolut serta keunggulan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp 17,006,437.08 Juta.

3. Analisis Tipologi Klasen

Analisis Tipologi Klassen merupakan alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi daerah ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi PDRB daerah. Tujuan penelitian adalah untuk melihat potensi sektor ekonomi di Kota Surakarta.

Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $si > s$. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.
- Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II). Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB

daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $gi > g$ dan $si < s$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (si) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $gi > g$ dan $si < s$. Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.
- d. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Oleh sebab itu kajian ini akan menyajikan data laju pertumbuhan dan pangsa PDRB Kota Surakarta periode 2017-2022 yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis Tipologi Klasen, sebagai berikut:

Table 5: Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.02	2.96	1.93	2.14	2.20	2.65
2.	Pertambangan dan Penggalian	(62.14)	(7.68)	(6.15)	(14.77)	(21.44)	(22.44)
3.	Industri Pengolahan	4.35	5.88	(4.01)	6.13	5.72	3.61
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.99	5.21	1.59	6.85	5.45	4.82
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.64	4.74	3.22	(4.30)	(2.96)	1.07
6.	Konstruksi	5.01	4.61	(1.97)	0.69	1.08	1.88
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	4.95	5.18	(5.18)	5.75	4.60	3.06
8.	Transportasi dan Pergudangan	5.69	7.32	(62.54)	3.46	131.39	17.06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.16	5.21	(16.20)	8.43	43.62	9.04
10.	Informasi dan Komunikasi	12.11	10.12	19.70	7.68	2.11	10.34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.35	4.44	2.13	2.28	2.19	2.88
12.	Real Estate	2.54	2.98	0.43	3.42	5.77	3.03
13.	Jasa Perusahaan	9.06	9.53	(8.53)	2.19	6.79	3.81
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	3.02	3.90	(2.15)	(0.19)	2.20	1.36
15.	Jasa Pendidikan	5.80	5.98	(0.96)	0.13	3.30	2.85

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.78	6.19	12.11	1.22	3.80	6.42
17.	Jasa Lainnya	7.12	7.44	(14.32)	0.07	6.15	1.29
	PDRB	5.75	5.78	(1.76)	4.01	6.25	4.01

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Tabel di atas menyajikan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022 yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis Tipologi Klasen. Dimana analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebagai tolok ukurnya. Namun demikian, karena dalam analisis Tipologi Klasen juga diperlukan data kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, kajian ini juga akan menyajikan kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta.

Table 6: Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Jenis Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.0042	0.0041	0.0043	0.0042	0.0040	0.0042
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.	Industri Pengolahan	0.0763	0.0764	0.0746	0.0762	0.0758	0.0759
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.0023	0.0022	0.0023	0.0024	0.0024	0.0023
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0015	0.0016
6.	Konstruksi	0.2593	0.2564	0.2559	0.2477	0.2357	0.2510
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil	0.2328	0.2315	0.2235	0.2272	0.2237	0.2277
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.0287	0.0291	0.0111	0.0110	0.0240	0.0208
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.0499	0.0497	0.0424	0.0442	0.0597	0.0492
10.	Informasi dan Komunikasi	0.1462	0.1522	0.1854	0.1920	0.1845	0.1721
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.0338	0.0333	0.0347	0.0341	0.0328	0.0337
12.	Real Estate	0.0428	0.0417	0.0426	0.0424	0.0422	0.0423
13.	Jasa Perusahaan	0.0076	0.0079	0.0074	0.0072	0.0073	0.0075
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial	0.0517	0.0508	0.0506	0.0486	0.0467	0.0497
15.	Jasa Pendidikan	0.0421	0.0422	0.0425	0.0410	0.0398	0.0415
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.0107	0.0107	0.0122	0.0119	0.0116	0.0114
17.	Jasa Lainnya	0.0099	0.0101	0.0088	0.0084	0.0084	0.0091
	PDRB	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta di atas selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis Tipologi Klasen. Analisis dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta dengan Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan

sektor ekonomi di Kota Semarang sesuai dengan klasifikasi, apakah sebagai sektor yang maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial, atau sektor tertinggal.

Table 7: Matriks Tipologi Klasen

Kuadran I Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Kuadran II Sektor Maju, Tapi Tertekan
• Pengadaan listrik dan gas. • Penyediaan akomodasi dan makan minum. • Informasi dan komunikasi. • Jasa keuangan dan asuransi. • Real estate. • Jasa perusahaan. • Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.	• Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. • Konstruksi. • Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. • Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. • Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. • Jasa pendidikan.
Kuadran III Sektor Potensial	Kuadran IV Sektor Tertinggal
• Transportasi dan pergudangan.	• Pertanian, kehutanan, dan perikanan. • Pertambangan dan penggalan. • Industri pengolahan. • Jasa lainnya.

Sumber: Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen dengan pendekatan PDRB di Kota Surakarta maka dapat dilihat bahwa beberapa klasifikasi sektor:

- a. Sektor Maju dan Tumbuh Pesat :
 - Pengadaan listrik dan gas.
 - Penyediaan akomodasi dan makan minum.
 - Informasi dan komunikasi.
 - Jasa keuangan dan asuransi.
 - Real estate.
 - Jasa perusahaan.
 - Jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
- b. Sektor Maju Tapi Tertekan :
 - Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
 - Konstruksi.
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
 - Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
 - Jasa pendidikan.
- c. Sektor Potensial :
 - Transportasi dan pergudangan
- d. Sektor Tertinggal :
 - Pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - Pertambangan dan penggalan.
 - Industri pengolahan.
 - Jasa lainnya.

PELUANG INVESTASI DI KOTA SURAKARTA

Mengacu pada rencana struktur dan pola ruang Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta, maka terdapat beberapa potensi investasi berdasarkan rencana pengembangan wilayah Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Kawasan Pengembangan Energi
Kawasan pengembangan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan seluas 3 ha dan Kecamatan Jebres seluas 8 ha. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo di Kecamatan Jebres.
2. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha, dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.
Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan, dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dilaksanakan di seluruh kecamatan. Untuk menunjang pariwisata, dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar, dan Sungai Bengawan Solo.
4. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi Kawasan ini meliputi: (i) Kawasan stasiun Purwosari dan sekitarnya; (ii) Kawasan stasiun Jebres dan sekitarnya; (iii) Kawasan Pasar Gede dan sekitarnya; (iv) Kawasan Joglo dan sekitarnya; (v) Kawasan Gading dan sekitarnya; dan (vi) Kawasan Pasar Klewer dan sekitarnya.
5. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya.
Kawasan ini antara lain, (i) Kawasan Keraton Kasunanan dan sekitarnya; (ii) kawasan Pura Mangkunegaran dan sekitarnya; (iii) Kawasan Taman Sriwedari dan sekitarnya; dan (iv) Kawasan Taman Balekambang dan sekitarnya.

6. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
Pengembangan kawasan strategis ini yaitu kawasan Solo Techno Park (STP) dan sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan Solo Techno Park dan sekitarnya meliputi:
 - a) kerjasama penataan kawasan Solo Techno Park
 - b) penerpaduan penataan kawasan Solo Techno Park dengan kawasan disekitarnya
 - c) mendorong kegiatan pameran teknologi.
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
Pengembangan kawasan strategis ini yaitu berupa Kawasan Satwa Taru Jurug dan sekitarnya. Kebijakan pengembangan kawasan tersebut meliputi:
 - a) peningkatan fungsi kawasan sebagai RTH dan rekreasi
 - b) pelestarian flora dan fauna
 - c) pengembangan pameran dan atraksi budaya.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam masterplan investasi ini, ditetapkan Visi jangka panjang investasi Kota Surakarta sebagai berikut:

“Kota Berbudaya, Ramah Investasi dan Berkelanjutan menuju Pertumbuhan Ekonomi dan terwujudnya masyarakat Sejahtera”

Adapun misi yang ditetapkan sebagai penterjemahan atas visi investasi di atas adalah:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan aman.
2. Mewujudkan infrastruktur investasi yang mamadai
3. Menjamin adanya kepastian hukum
4. Mewujudkan investasi yang ramah lingkungan,
5. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan berkembangnya ekonomi kreatif
6. Mewujudkan pelayanan yang professional dan berkeadilan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam menjabarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban wilayah
2. Membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan investasi
3. Mewujudkan harmonisasi kebijakan pengaturan investasi dan usaha sesuai kewenangan daerah
4. Pengaturan penempatan investasi sesuai kebijakan penataan ruang dan pencegahan/pengendalian dampak lingkungan,
5. Mewujudkan investasi yang pro budaya lokal dan menumbuhkembangkan inovasi dan ekonomi kreatif
6. Mewujudkan pelayanan yang professional dan berkeadilan

Sasaran jangka panjang dari penetapan tujuan pencapaian masterplan investasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya kasus gangguan keamanan wilayah
2. Menurunnya kasus gangguan ketertiban umum
3. Menurunnya konflik hubungan industrial
4. Terbangunnya infrastruktur baru untuk mendukung tumbuhnya investasi

5. Terpeliharanya infrastruktur yang telah ada sehingga berfungsi baik untuk mendukung iklim kondusif investasi
6. Meningkatnya pertumbuhan inovasi dan berkembangnya 17 sub sektor ekonomi kreatif
7. Terwujudnya kebijakan investasi yang konsisten dalam rangka mendukung tumbuhnya investasi
8. Terbitnya peraturan perundangan daerah yang sinkron dan konsisten mendorong perwujudan iklim kondusif investasi.
9. Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur yang melayani.

ROADMAP INVESTASI

Roadmap pengembangan investasi Kota Surakarta dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan mengembangkan rencana aksi (*action plan*) dan *pipeline*. Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu rencana aksis harus dirumuskan dan dinyatakan dalam bentuk tahapan yang akan dilaksanakan dimasa depan untuk mewujudkan sasaran strategis. Sedangkan *pipeline* adalah visualisasi dari tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang disusun untuk menentukan berbagai faktor yang berpotensi menjadi kendala dan keberhasilan upaya tersebut.

Table 8: Rencana Aksi Pengembangan Investasi Kota Surakarta

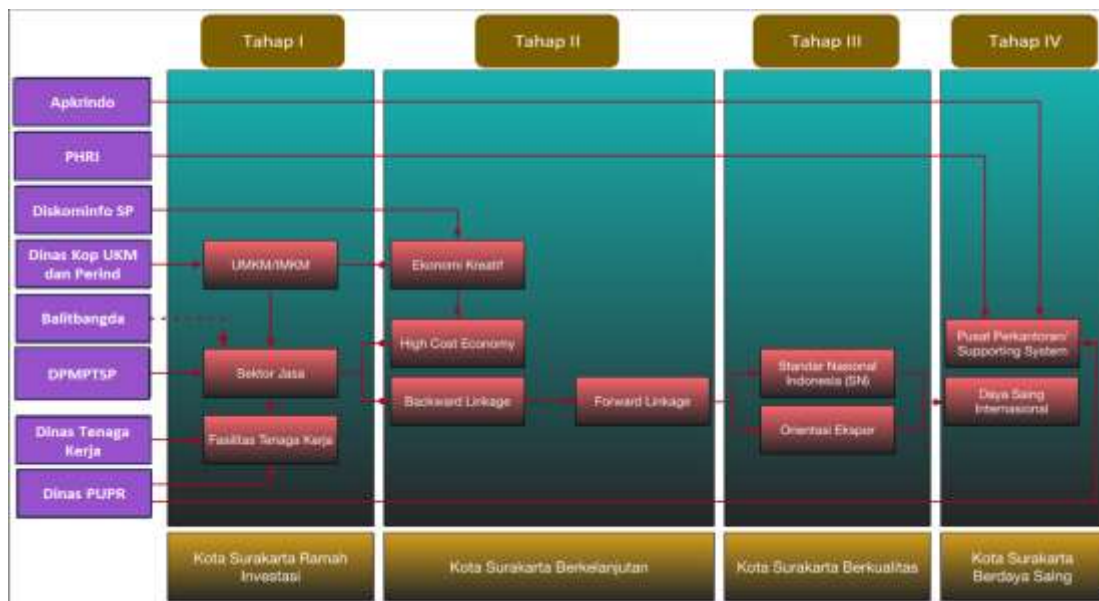
No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
1.	Usaha/Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi yang bisa mendorong UMKM tumbuh menjadi usaha/industri yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang pro dan ramah UMKM/UMKM, misalnya wajib membayar tunai atau masa jatuh tempo pembayaran sependek mungkin untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan sektor usaha ini.					- Jumlah UMKM meningkat. - Jumlah UMKM yang dikategorikan sebagai pelaku ekonomi kreatif meningkat.	Dinkop UKM Perind Kota Surakarta.
2.	Sektor Jasa	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan peluang usaha dibidang jasa yang masih potensial untuk dijalankan di daerah ini, disertai dengan informasi mengenai jumlah konsumen, lokasi yang tersedia, pesaing, dan sebagainya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>supporting system</i> bagi perusahaan-perusahaan besar yang berlokasi di kawasan Aglomerasi Soloraya dan sekitarnya.					Jumlah investasi sektor usaha lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, baik jumlah maupun nilai investasinya.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Dinas PUPR Kota Surakarta. - DPMPTSP Kota Surakarta.
3.	Fasilitas Tenaga Kerja	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data komprehensif terkait dengan ketenagakerjaan, baik sektor formal maupun informal, mulai dari jumlah tenaga kerja usia produktif, tingkat pendidikan, kompetensi, jumlah kebutuhan tenaga kerja, asal tenaga kerja, dan sebagainya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi tenaga kerja luar kota yang tercatat di berbagai perusahaan					Kebijakan (peraturan/keputusan pimpinan daerah) untuk tenaga kerja luar kota.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Kota Surakarta. - Dinas PUPR Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
		yang berlokasi di daerah ini, misalnya hak untuk menyewa kamar Rusunawa.						
4.	Ekonomi Kreatif	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha/industri untuk menghasilkan produk unik dan kreatif yang mencerminkan kekhasan daerah ini, misalnya menempatkan batik sebagai spirit dari semua produk Kota Surakarta. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya program dan kegiatan fasilitasi meningkatkan kemampuan pelaku dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mengurus hak cipta atas produk yang dihasilkannya.					Jumlah pelaku ekonomi kreatif meningkat.	- Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Diskominfo SP Kota Surakarta.
5.	<i>High Cost Economy</i>	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan instrumen yang dapat mengeliminasi faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi yang mengakibatkan produk dari daerah ini menjadi tidak kompetitif di pasar global. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya melakukan pengawasan secara intensif, kontinyu, dan berkelanjutan untuk menekan penyebab munculnya faktor-faktor ekonomi berbiaya tinggi.					Harga/tarif produk semakin kompetitif dibandingkan harga/tarif produk sejenis dari daerah/negara lain.	- Disnaker Kota Surakarta. - Balitbangda Kota Surakarta. - Bappeda Kota Surakarta.
6.	<i>Backward Linkage</i>	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>backward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.					Jumlah perusahaan yang bersifat <i>backward linkage</i> meningkat.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Balitbangda Kota Surakarta.
7.	<i>Forward Linkage</i>	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis industri yang bisa dikembangkan dalam satu sistem rantai pasokan (<i>supply chain</i>) yang sama, termasuk nama usaha/industri, jenis produk, kapasitas produksi, potensi konsumen, dan sejenisnya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha yang bersifat <i>forward linkage</i> dengan usaha/industri yang telah ada sebelumnya.					Jumlah perusahaan yang bersifat <i>forward linkage</i> meningkat.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Balitbangda Kota Surakarta.
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI)	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan keberadaan produk yang sudah berlabel SNI, produk memenuhi kualifikasi pengajuan sertifikasi SNI, produk yang harus ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi persyaratan sertifikasi SNI, dan sebagainya. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi pengajuan sertifikasi SNI bagi produk yang dinilai memenuhi kriteria SNI.					Jumlah produk berlabel SNI meningkat.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Kota Surakarta.

No	Variabel Kunci	Alternatif Solusi	Tahap				Indikator Keberhasilan	Stakeholder
			I	II	III	IV		
		Pemerintah Kota Surakatrta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas sebuah produk agar memenuhi kriteria SNI.						
9.	Orientasi Ekspor	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi ekspor, nilai ekspor, negara tujuan, dan informasi lain yang relevan. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan usaha/industri untuk menghasilkan produk yang mempunyai keunggulan kompetitif, khususnya dari aspek kualitas dan harga. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi agar setiap usaha/industri mempunyai peluang mengeksport produknya, misalnya dalam bentuk penyelenggaraan ekspo di dalam maupun diluar negeri.					Jumlah produk yang layak dan laik ekspor meningkat.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - DPMPTSP Kota Surakarta.
10.	Pusat Perkantoran/ <i>Supporting System</i>	Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan kebijakan yang mengatur pemberian insentif bagi investor yang bersedia membuka dan menjalankan usaha jasa <i>supporting system</i> bagi daerah di kawasan Aglomerasi Soloraya dengan menyediakan gedung perkantoran, gedung MICE, hotel, restoran/rumah makan, perbankan, dan sebagainya.					- Jumlah perusahaan dari kawasan Aglomerasi Soloraya yang berkantor di Kota Surakarta meningkat. - Jumlah kegiatan MICE meningkat.	- Dinas PUPR Kota Surakarta. - DPMPTSP Kota Surakarta. - PHRI Kota Surakarta. - Apkrindo Kota Surakarta.
11.	Daya Saing Internasional	- Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyusun data terkait dengan jenis produk yang dinilai memenuhi kualifikasi daya saing internasional, disertai dengan inovasi yang pernah dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, mutu, keamanan, dan kesehatan barang tersebut. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan kreatifitas agar para pengusaha terdorong untuk selalu menghasilkan produk yang inovatif dan unik. - Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya menyiapkan program dan kegiatan fasilitasi untuk mendorong kemampuan sebuah usaha/industri dalam meningkatkan efisiensi proses produksinya.					- Produk baru yang lebih inovatif diperkenalkan secara periodik dan kontinyu. - Tingkat penjualan produk lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari negara lain. - Demand lokal, regional, internal untuk produk tersebut meningkat.	- Disnaker Kota Surakarta. - Dinkop UKM Perind Kota Surakarta. - Politeknik ATMI Surakarta.

Selanjutnya, untuk melengkapi kajian ini, akan disusun *pipeline* untuk mempermudah dalam memahami rencana aksi pengembangan investasi Kota Surakarta. *Pipeline* akan disusun dalam lima tahapan pencapaian target seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan variabel kunci kesuksesan pengembangan investasi Kota Surakarta. Dimana setiap tahapan kegiatan tidak bersifat serial namun bisa dilaksanakan secara paralel dalam satu periode waktu yang sama dengan tahapan lain.

Pipeline adalah visualisasi dari tahapan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yang disusun untuk menentukan berbagai faktor yang berpotensi menjadi kendala dan keberhasilan upaya tersebut. Oleh sebab itu *pipeline* akan dikembangkan dengan menggunakan variabel kesuksesan kunci kunci, yaitu (1) Standar Nasional Indonesia, (2) Daya Saing Internasional, (3) Orientasi Ekspor, (4) Sektor Jasa, (5) *Backward Linkage*, (6) *Forward Linkage* (7) Menekan *High Cost Economy*, (8) Fasilitas Tenaga Kerja, (9) Pusat Perkantoran, (10) UMKM, dan (11) Ekonomi Kreatif.



Gambar 5. Pipeline Masterplan Pengembangan Investasi Kota Surakarta

PENUTUP

Kesimpulan

Investasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Indonesia, termasuk bagi Kota Surakarta. Alasan inilah yang mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta menyusun kajian Masterplan Investasi Kota Surakarta ini sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman dalam pengembangan berbagai kebijakan investasi daerah, khususnya dalam jangka panjang. Dimana dari analisis yang telah dilakukan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Surakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Surakarta sehingga dinamika yang terjadi di Kabupaten di sekitarnya juga akan memberi dampak terhadap daerah ini, termasuk dibidang investasi.
2. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan investasi cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir, yang menjadi salah satu bukti daya tarik daerah ini bagi investor untuk membuka dan menjalankan usaha.
3. Kota Surakarta merupakan daerah yang relatif cukup kondusif, aman, dan menjanjikan bagi bisnis sehingga investasi yang masuk tidak hanya terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) namun juga Penanaman Modal Asing (PMA).

4. Kota Surakarta merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan investasi UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal usaha besar, yang bisa menjadi salah satu modal dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
5. Kota Surakarta merupakan daerah yang sebagian besar investasi dalam negeri dan asing yang masuk ditanamkan pada usaha hotel dan restoran sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor jasanya, khususnya pariwisata.
6. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai tiga sektor investasi unggulan, yaitu pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan ketiga sektor tersebut dibandingkan dengan sektor lainnya.
7. Kota Surakarta merupakan daerah yang mempunyai kelemahan inheren sebagaimana wilayah perkotaan lain di Indonesia, yaitu keterbatasan dalam menyediakan lahan yang relatif cukup luas bagi investasi usaha pabrikasi.

Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, untuk mendukung hasil kajian ini disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan sektor prioritas setiap tahapan dalam masterplan. Pentapan sektor prioritas melalui identifikasi terhadap sektor prioritas seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi untuk fokus investasi.
2. Pemerintah Kota Surakarta mendorong pembangunan dan pengembangan pusat bisnis modern dan fasilitas coworking untuk mendukung pertumbuhan perusahaan start-up.
3. Pemerintah Kota Surakarta melakukan pengembangan berbagai pelatihan dengan mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil.
4. Pemerintah Kota Surakarta Mendorong inovasi teknologi dengan memberikan insentif kepada perusahaan teknologi dan start-up.
5. Pemerintah Kota Surakarta terus membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
6. Pemerintah Kota Surakarta melakukan peningkatan infrastruktur digital dengan mempercepat pengembangan infrastruktur digital dan konektivitas internet.
7. Mengembangkan kampanye promosi investasi yang kuat untuk menarik lebih banyak investor di Kota Surakarta.
8. Pemerintah Kota Surakarta memberikan insentif untuk investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
9. Terus meningkatkan iklim bisnis dengan penyederhanaan regulasi dan perizinan dalam mendukung kemudahan berbisnis.
10. Melakukan evaluasi berkala terhadap masterplan investasi untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan kebijakan.

